

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian mengenai jaringan politik masih menarik untuk diteliti pada saat ini. Jaringan politik merupakan hubungan yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain sehingga timbul hubungan yang berkaitan dengan politik antara kedua individu tersebut. Jaringan politik bermula dari hubungan atau interaksi yang dilakukan antara satu individu dengan individu lain yang kemudian dapat digunakan dalam proses pencapaian kekuasaan oleh individu atau kelompok didalam dunia politik. Modal sosial menjadi bagian yang dimanfaatkan oleh seorang calon yang berasal dari interaksinya dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi percaya kepada calon tersebut. Modal sosial ini kemudian menghasilkan jaringan. Jaringan akan berkembang sesuai dengan kondisi individu yang mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Jaringan politik merupakan suatu jaringan dari ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor politik lain untuk menjalin hubungan politik yang kuat.¹ Hubungan politik yang kuat menghasilkan interaksi politik yang berkelanjutan sehingga satu sama lain terikat dengan seperangkat harapan dan tujuan yang sama. Jaringan politik dapat dilihat dari dua bagian. Pertama, jaringan politik yang baru terbentuk atau baru ada pada saat menjelang masa kampanye atau menjelang pemilihan umum. Kedua adalah jaringan politik yang sebelumnya merupakan jaringan sosial yang telah lama terbentuk di dalam suatu masyarakat dan ketika mendekati masa kampanye jaringan sosial ini diajak dan diminta untuk bergabung mendukung calon kepala daerah atau calon legislatif sehingga terbentuk menjadi jaringan politik.² Oleh karena itu jaringan politik memainkan peran penting

¹ Denny, J.A. 2006, *Catatan Politik*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta

² Sofia Almadiyah. 2022. *Jaringan Politik dalam Pemilihan Walikota Makassar (Studi Kasus Kemenangan Danny Pomanto-Fatmawaty Rusdi dalam Pilwalkot Makassar 2020)*. Universitas Hasanuddin

dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembentukan opini publik serta jaringan ini dapat membuat aktor politik memobilisasi sumber daya, memperoleh dukungan, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Tanggal 14 Februari 2024, Indonesia menggelar pemilihan umum (Pemilu) serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu serentak ini dilaksanakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-22/2024. Pemilihan legislatif (Pileg) untuk DPD Republik Indonesia (RI) menjadi bagian penting dari rangkaian Pemilu di Indonesia karena memilih anggota DPD RI dari setiap provinsi secara langsung oleh rakyat. DPD RI berperan sebagai lembaga perwakilan daerah yang bertugas mewakili kepentingan daerah, memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR RI mengenai isu-isu terkait otonomi daerah, menjadi penghubung pusat dan daerah salah satunya dalam pertimbangan keuangan, merumuskan pembentukan serta pemekaran daerah dan pengelolaan sumber daya alam.

Hasil Pileg DPD RI Sumbar pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 awalnya menetapkan empat calon terpilih: Cerint Irraloza Tasya, Muslim M. Yatim, Jelita Donal, dan Emma Yohanna. Namun, hasil ini diulang melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 13 Juli 2024. PSU ini terjadi karena MK mengabulkan gugatan Irman Gusman atas KPU sehingga MK memutuskan agar diadakan PSU di Sumatera Barat. Dengan hasil rekapitulasi terbaru dari PSU, Irman Gusman berhasil menggantikan Emma Yohanna setelah memperoleh suara lebih tinggi di PSU. Kemenangan Irman sudah diprediksi oleh banyak pihak karena popularitasnya yang tetap kuat di Sumbar meskipun pernah terjerat kasus korupsi pada 2016 saat menjabat sebagai Ketua DPD RI. Dukungan kuat tersebut didorong oleh jaringan politiknya yang luas, serta pengalaman dan kiprahnya selama hampir 25 tahun di berbagai organisasi dan bisnis.

Kemenangan Irman Gusman coba peneliti lihat dari berbagai sisi, peneliti membandingkan Irman Gusman dengan kompetitornya yang lain dalam pemilihan PSU dari beberapa aspek utama: (1) finansial, Irman memiliki sumber daya finansial yang kuat, didukung oleh pengalaman sebagai mantan Ketua DPD RI dan bisnisnya melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengannya. Dilansir dari news.detik.com,³ Menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2014 harta Irman Gusman berkisar sebesar 35 miliar. Karena ini data dari 2014 yang sudah 10 tahun yang lalu, sehingga kemungkinan hartanya akan naik 2-3x lipat dari 2014. Beberapa pesaing dari kalangan pengusaha lokal juga memiliki sumber daya finansial yang kuat, tetapi masih terbatas dibandingkan Irman. Di antara calon lain yang berada di peringkat kedua yang memiliki finansial yang kuat adalah Emma Yohanna dengan kekayaan sebesar 7 miliar lebih⁴ dan Muslim M. Yatim di 2 miliar lebih⁵, (2) modal sosial, Irman memiliki modal sosial yang kuat berkat pengakuan publik dan hubungannya dengan komunitas serta tokoh adat di Sumatera Barat dan Muhammadiyah menjadi modal sosial terbesar Irman Gusman. Pesaingnya mungkin juga memiliki modal sosial, terutama jika berasal dari latar belakang organisator dan pebisnis, namun pengaruh mereka tidak seluas yang dimiliki Irman, (3) dukungan tokoh dan elite lokal, Irman didukung oleh tokoh-tokoh besar di Sumatera Barat, termasuk tokoh adat dan elite politik, yang memperkuat posisinya. Sementara itu, pesaingnya lebih mengandalkan jaringan keluarga dan dukungan dari tokoh lokal yang lebih kecil, (4) pengalaman dan rekam jejak, Pengalaman Irman sebagai anggota DPD RI menjadi keunggulan signifikan, memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan daerah. Beberapa pesaing mungkin memiliki

³ Irman Gusman Terakhir Lapor 2014, Hartanya Rp 31,9 M dan US\$ 40,99" *detikNews*, diakses 10 April 2025, <https://news.detik.com/berita/d-3300362/irman-gusman-terakhir-lapor-2014-hartanya-rp-31-9-m-dan-us-40-995>

⁴ Ketrin, Diorinisa Jerubu. *Maju di Pilgub Sumatera Barat 2024: Inilah Rincian Harta Kekayaan Emma Yohanna*. Diakses 24/5/2025. dari <https://flores.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2978425670/maju-di-pilgub-sumatera-barat-2024-inilah-rincian-harta-kekayaan-emma-yohanna?page=2>

⁵ Harisa, Dharma. *Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah*. Diakses 24/5/2025 di <https://langgam.id/harta-kekayaan-anggota-dpr-dan-dpd-asal-sumbar-mulyadi-terkaya-cerint-iralloza-terendah/>

pengalaman di pemerintahan lokal atau sebagai aktivis dan petahana DPD RI seperti Emma Yohanna, Leonardy Hermainy tetapi nyatanya mereka tidak terpilih kembali. Perbandingan-perbandingan tadi dapat dilihat Irman Gusman memang lebih unggul dari pesaingnya yang lain, tetapi peneliti lebih melihat ada satu kesatuan yang membuat Irman Gusman lebih dijagokan dari calon yang lain yaitu rekam jejak dan pengalaman Irman Gusman yang membuatnya memiliki modal sosial sehingga mendapatkan dukungan dan pengakuan dari elit-elit lokal dan dukungan Ormas terbesar di Sumatera Barat yaitu Muhammadiyah.

Peneliti mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang jaringan politik. Penelitian dari Ronaldo Syahputra berjudul Pengelolaan Jejaring Politik Lisda Hendrajoni pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2019 di Sumatera Barat.⁶ Penelitian dari Sofia Almadiyah yang berjudul Jaringan Politik dalam Pemilihan Walikota Makassar (Studi Kasus Kemenangan Danny Pomanto-Fatmawaty Rusdi dalam Pilwalkot Makassar 2020).⁷ Kedua penelitian ini Mengangkat isu tentang pengelolaan dan pengoptimalan jaringan politik dalam Pemilu legislatif. Penelitian selanjutnya dari Hafiz Satria Putra, Asrinaldi & Indah Adi Putri yaitu Analisa Pengoptimalan Jaringan Politik Firdaus dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat.⁸ Artikel yang ditulis oleh Ainur Rohim yang berjudul Pembelahan Dukungan Jaringan Politik NU dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.⁹ Penelitian dari Mikhael Lamabelawa berjudul Jaringan Sosial dan Mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores

⁶ Ronaldo Syaputra. 2020. *Pengelolaan Jejaring Politik Lisda Hendrajoni pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2019 di Sumatera Barat*. Universitas Andalas. unpublished

⁷ Sofia Almadiyah. 2022. *Jaringan Politik dalam Pemilihan Walikota Makassar (Studi Kasus Kemenangan Danny Pomanto-Fatmawaty Rusdi dalam Pilwalkot Makassar 2020)*. Universitas Hasanuddin.

⁸ Hafiz Satria Putra, Asrinaldi & Indah Adi Putri. 2023. Analisa Pengoptimalan Jaringan Politik Firdaus dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*. 10 (4): 1347-1354

⁹ Ainur Rohim 2019. Pembelahan Dukungan Jaringan Politik NU dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Jurnal Politik Indonesia*. 5 (1): 32-62

Timur Tahun 2017.¹⁰ Penelitian terdahulu ini mengangkat tentang isu jaringan politik dan mobilisasi massa pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Persamaan dari penelitian terdahulu yang peneliti lihat adalah semua penelitian terdahulu mengangkat isu jaringan politik dan mobilisasi dukungan dalam pemilihan umum (Pemilu), baik legislatif maupun eksekutif (kepala daerah). Fokusnya pada bagaimana jaringan politik tersebut digunakan sebagai strategi untuk memenangkan pemilihan. Perbedaan yang peneliti lihat adalah tingkat pemilihan. Beberapa penelitian fokus pada pemilu legislatif sementara lainnya membahas pemilihan kepala daerah (Pilkada). Objek studinya, setiap penelitian memiliki subjek atau kandidat yang berbeda, serta strategi jaringan politik yang mungkin bervariasi sesuai konteks lokalnya/daerah penelitiannya (Sumatera Barat, Makassar, Jawa Timur, Flores Timur).

Research gap yang peneliti temukan dalam penelitian ini yang membedakannya dari penelitian sebelumnya adalah jaringan politik yang peneliti teliti untuk mengetahui peran dan proses dari jaringan politik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi non politik seperti organisasi agama dan organisasi sosial dalam penelitian ini yaitu Muhammadiyah sehingga berhasil memenangkan Irman Gusman di PSU DPD RI. Sedangkan peneliti belum menemukan secara spesifik dalam penelitian terdahulu yang membahas hal tersebut. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana organisasi Muhammadiyah berkontribusi terhadap dinamika mobilisasi pemilih dalam kemenangan calon legislatif di PSU.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilu serentak telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024, salah satunya Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang sukses melaksanakan rangkaian Pemilu serentak tersebut. Pada Pemilu 2024, partisipasi pemilih di Sumatera Barat mencapai tingkat tertinggi dibandingkan periode sebelumnya tahun 2019. Berdasarkan data

¹⁰Mikhael Lamabelawa. 2020. Jaringan Sosial dan Mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2017. *Jurnal Bunga Rampai Tata kelola Pemilu Indonesia*. 2 (1): 27-47

Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Sumbar tercatat sebanyak **4.088.606** pemilih, meningkat dari **3.718.003** pada Pemilu Serentak 2019. Peningkatan ini juga tercermin dalam Pileg DPD RI, di mana total suara sah yang masuk pada tahun 2024 mencapai **2.865.393**, naik dibandingkan **2.522.971** suara pada tahun 2019. Berikut disajikan tabel hasil perolehan suara tertinggi calon anggota DPD RI dari Sumatera Barat pada Pemilu Serentak 14 Februari 2024.¹¹

Tabel 1.1
Caleg Terpilih DPD RI Dapil Sumatera Barat 2024-2029 pada Pemilu 14 Februari

No.	Nama caleg DPD RI	Jumlah suara
1	Cerint Iralloza Tasya	465.958
2	Emma Yohanna	357.627
3	Jelita Donal	260.820
4	Muslim M. Yatim	247.495

Sumber: Data diambil dari hasil rekapitulasi Pemilu DPD RI 2024 bulan Februari untuk Provinsi Sumatera Barat oleh KPU.

Dilansir dari Kompas¹² menjelaskan tentang rangkaian yang dilakukan oleh Irman Gusman dalam memperjuangkan terlaksananya PSU DPD RI 2024 di Sumatera Barat. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil suara DPD RI Sumbar, Irman Gusman mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini muncul karena sebelumnya Irman tercatat dalam daftar calon sementara (DCS) DPD RI 2024 dari Dapil Sumbar, namun KPU mencoretnya dari daftar calon tetap (DCT) berdasarkan masukan masyarakat dan beberapa pihak yang menyatakan Irman tidak memenuhi syarat karena riwayat kasus hukumnya. KPU mengacu pada Putusan MK Nomor 112/PUU-XXI/2023, yang mensyaratkan mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih harus menunggu 5 tahun

¹¹ Hasil hitung Suara DPD Sumatera Barat. <<https://pemilu2024.kpu.go.id/>> [diakses 20 Juli 2024]

¹² Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman. Diakses 4/10/2024 di <<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all>>.

setelah bebas murni sebelum bisa mencalonkan diri kembali dalam Pemilu. Namun, sebelum putusan MK ini diterbitkan, KPU telah mengeluarkan PKPU 12/2023 yang belum mencantumkan masa tunggu tersebut. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menggugat aturan PKPU ini ke Mahkamah Agung (MA), dan MA memutuskan agar pasal terkait mantan terpidana dalam PKPU 12/2023 dibatalkan dan diubah sesuai dengan putusan MK.

Irman kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Irman menganggap, putusan pidana yang secara khusus menghukum dirinya ini lebih utama ketimbang aturan yang lebih umum berupa masa tunggu 5 tahun. Seperti kata Irman kepada Kompas

"Dalam hal seseorang dicabut hak politiknya seumur hidup, apakah setelah jeda 5 tahun berdasarkan norma dalam kedua Putusan Uji Materiil tersebut, yang bersangkutan lantas diperbolehkan ikut berkontestasi? Tentu saja tidak! Sebab, yang berlaku adalah putusan hakim pidana secara *lex specialis*^{13,14}

Pada 19 Desember 2023, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh dalil gugatan Irman Gusman dan memerintahkan KPU untuk memasukkan namanya ke dalam daftar calon tetap (DCT) dalam waktu 3 hari. Namun, KPU menolak melaksanakan putusan tersebut, beralasan bahwa pada saat penetapan DCT di 2023, Irman belum memenuhi masa tunggu 5 tahun setelah bebas murni pada 2019, yang baru akan berakhir pada 26 September 2024. Persoalan ini kemudian berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang menegaskan bahwa KPU harus mematuhi putusan PTUN Jakarta. MK menyoroti bahwa pengabaian KPU terhadap putusan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak wibawa peradilan.

¹³ *Lex specialis*: sebuah prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum" (the specific law overrides the general law). Prinsip ini berlaku ketika ada dua aturan hukum yang bertentangan: satu aturan bersifat umum (*lex generalis*) dan satu aturan lebih khusus (*lex specialis*). Dalam situasi seperti itu, aturan yang lebih khusus akan diterapkan karena lebih relevan dengan kasus yang sedang ditangani.

¹⁴ Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman. <<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all>> [diakses Tanggal 28 Juli 2024]

MK akhirnya memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU DPD RI di Sumbar dengan memasukkan Irman Gusman sebagai peserta. PSU digelar pada 13 Juli 2024 di 17.569 TPS di 19 kabupaten/kota. Hasilnya, Irman berhasil mengamankan kursi keempat sebagai anggota DPD RI, dengan perolehan 176.987 suara. Ia berada di bawah Jelita Donal (187.765 suara), Muslim M. Yatim (199.919 suara), dan Cerint Irralozza Tasya, yang meraih suara tertinggi dengan 283.020 suara. Kemenangan Irman Gusman ini juga menjadi salah satu fenomena yang baru dan unik dalam kontestasi Pemilu Indonesia. Pertama kalinya PSU dilakukan di satu provinsi sejak Pemilu dilaksanakan di Indonesia dan kandidat yang baru masuk pasca putusan MK untuk melaksanakan PSU yaitu Irman Gusman tanpa melalui tahapan sosialisasi dan kampanye terbuka di dalam rangkaian Pemilu sebelumnya seperti kandidat-kandidat lain, berhasil menjadi salah satu yang lolos dan memenangkan hasil Pemilu.

Tabel 1.2

Caleg Terpilih DPD RI Dapil Sumatera Barat 2024-2029 pada Pemilu 13 Juli 2024

No.	Nama caleg DPD RI	Jumlah suara
1	Cerint Irralozza Tasya	283.020
2	Muslim M. Yatim	199.919
3	Jelita Donal	187.765
4	Irman Gusman	176.987

Sumber. Data diambil dari hasil rekapitulasi PSU DPD RI 2024 bulan Juli untuk Provinsi Sumatera Barat oleh KPU.

Kemenangan Irman Gusman dalam PSU tidak mengherankan karena Dilansir dari Tempo¹⁵ Irman Gusman yang memulai karir politiknya pada 1999 sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mewakili Sumbar. Selama di MPR, ia aktif dalam berbagai amandemen konstitusi dan dikenal sebagai pencetus sistem politik dua kamar (*bikameral*). Irman juga berhasil melobi

¹⁵ Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman. <<https://nasional.tempo.co/read/1894362/lolos-dpd-ri-setelah-dilakukan-pemungutan-suara-ulang-ini-profil-eks-terpidana-korupsi-irman-gusman>> [diakses Tanggal 4 September 2024]

pembentukan fraksi utusan daerah di MPR pada 2001 dan memperjuangkan perwakilan daerah sebagai Wakil Ketua MPR. Bersama koleganya, ia mendukung amandemen yang memungkinkan pemilihan langsung presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Selain itu, Irman berperan penting dalam mendirikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Berbagai kedudukan pernah dijabat, pada 2000 Irman menjadi Penasehat Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Sumatera Barat. Dia juga menjadi anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Dewan Penyantun Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selain itu, Irman juga sempat menjadi anggota Dewan Pakar Gebu Minang dan menjabat Wakil Ketua Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah, Dewan Pengurus Pengusaha Hutan. Jabatan lainnya antara lain Wakil Ketua Forum Komunikasi Usahawan Serantau, Ketua Yayasan Amal Bhakti Mukmin Indonesia, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer Padang, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Pusat, anggota Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin), dan Wakil Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Dilansir dari irmangusman.id¹⁶ prestasi-prestasi lain yang ditorehkan oleh Irman Gusman adalah *Honorary Knight Commander Of The Most Distinguished Of St. Michael And St. George*, Gelar *Datuk Nan Labiah* dari Suku Pisang di Guguak Tabek Sarajo, Agam. *Tuanku Besar Palinduang Alam* dari Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Pemimpin Muda Berpengaruh oleh Majalah Biografi Politik. Pemimpin Muda Berpengaruh oleh Majalah Jakarta Political Club, Pemimpin Muda Potensial di Parlemen Oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Organisasi masyarakat (Ormas) terbesar di Sumbar, Muhammadiyah yang menjadi pendukung terbesar Irman Gusman menyatakan dukungan penuh kepada

¹⁶ Profil-Irman Gusman. <<https://irmangusman.id/profile/>> [diakses Tanggal 4 September 2024]

Irman Gusman pada PSU DPD RI 2024. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas.

“Pak Irman, saya kira sosok yang pas. Kalau calon lain tidak begitu nampak”¹⁷

Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta untuk menanggapi putusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar yang memberikan rekomendasi kepada Irman Gusman untuk dipilih warga Muhammadiyah dalam pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD daerah pemilihan (Dapil) Sumbar

“...Irman merupakan kader Muhammadiyah yang maju di pentas politik nasional, tidak hanya mewakili Muhammadiyah saja, tetapi mewakili seluruh masyarakat Sumbar. Karena itu diperlukan tokoh yang mampu memiliki kemampuan lobi yang baik, jaringan yang luas baik di tingkat pusat maupun internasional. Selain itu, Irman memiliki pengalaman saat menjadi ketua DPD RI, serta posisi strategis lainnya.”¹⁸

PWM Sumbar telah mengeluarkan rekomendasi yang mengajak warga Muhammadiyah untuk mendukung dan memilih Irman Gusman sebagai anggota DPD RI pada PSU yang dijadwalkan pada 13 Juli 2024. Rekomendasi ini tertuang dalam surat bernomor 215/REK/II.0/D/2023, ditandatangani oleh Wakil Ketua Ki Jal Atri Tandjung dan Sekretaris H. Apris. Dukungan Muhammadiyah kepada Irman bukan tanpa alasan. Selain dinilai sebagai sosok yang berprestasi dan mewakili Sumbar di tingkat nasional, Irman juga merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, sebelumnya ayahnya pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar (UMSB) dan memegang posisi penting di PWM Sumbar. Irman sendiri mengikuti jejak ayahnya dengan menempati beberapa jabatan strategis

¹⁷Muhammadiyah: Irman Gusman sosok pas dapatkan rekomendasi Pileg DPD. <<https://www.antaranews.com/berita/4173351/muhammadiyah-irman-gusman-sosok-pas-dapatkan-rekomendasi-pileg-dpd>> [diakses Tanggal 30 Agustus 2024]

¹⁸Muhammadiyah: Irman Gusman sosok pas dapatkan rekomendasi Pileg DPD. <<https://www.antaranews.com/berita/4173351/muhammadiyah-irman-gusman-sosok-pas-dapatkan-rekomendasi-pileg-dpd>> [diakses Tanggal 30 Agustus 2024]

di PWM Sumbar.¹⁹ Dukungan ini diberikan secara objektif oleh PWM Sumbar karena mereka melihat Irman Gusman sebagai salah satu kader terbaik Muhammadiyah yang mampu membawa Sumbar maju di tingkat nasional.

Wakil Ketua PWM bidang lembaga hikmah dan kebijakan publik (LHKP), Yosmeri, mengakui bahwa Irman lolos ke DPD RI lewat proses panjang. Dijelaskannya, Irman memenangi PSU dan lolos ke DPD tanpa berkampanye. Hal ini karena selama proses PSU para calon anggota DPD tidak boleh berkampanye.

“Kita di perserikatan juga berupaya membantu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dari cabang hingga ranting agar keterpilihan pak Irman bisa kita wujudkan”²⁰

Pernyataan dari Wakil Ketua bidang LHKP yang menjadi pembuat rekomendasi kepada calon-calon yang berkontestasi pada Pileg DPD RI salah satu Irman Gusman menjadi bukti Muhammadiyah memainkan peran penting dan sentral dalam kemenangan Irman Gusman dalam PSU DPD RI dan hal ini juga dikuatkan dengan dukungan dan rekomendasi kader-kader Muhammadiyah dari berbagai kalangan yang juga mendukung serta menjadi tim pemenang Irman Gusman dalam PSU DPD RI antara lain: **(1) tokoh masyarakat Sumatera Barat**, banyak tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat yang mendukung Irman Gusman karena kontribusinya terhadap pembangunan di Sumatera Barat. Salah satu aktornya adalah Marhadi Effendi yang pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Barat dan menjadi ketua Timses Irman Gusman dan juga merupakan wakil ketua PWM bidang lingkungan hidup dan resiliensi bencana, **(2) akademisi dan intelektual**, beberapa akademisi yang mengenal rekam jejak Irman di dunia pendidikan dan ekonomi dan sering bekerjasama dengan Irman Gusman turut. Salah satu aktornya adalah Sofyan Karim yang merupakan Ketua Pembina Irman Gusman Center dan juga bagian dalam

¹⁹ Muhammadiyah Dukung Irman Gusman Jadi Anggota DPD RI pada PSU 13 Juli 2024. <<https://langgam.id/muhammadiyah-dukung-irman-gusman-jadi-anggota-dpd-ri-pada-psu-13-juli-2024/>> [diakses Tanggal 4 September 2024]

²⁰ Yakub, Priyatama Wijayaatmaja. Mantan Ketua DPD Irman Gusman Kantongi Mayoritas Suara di PSU DPD RI. Pada 15 Juli. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/685210/mantan-ketua-dpd-irman-gusman-kantongi-mayoritas-suara-di-psu-dpd-sumbar> <diakses tanggal 11 Oktober 2024>

kepengurusan PWM Sumbar, (3) **aktivis dan organisasi pemuda**, aktivis sosial dan organisasi pemuda di Sumatera Barat banyak yang memberikan dukungan karena melihat Irman sebagai figur yang memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional. Salah satu aktornya adalah Fahrul Rizal yang merupakan Sekretaris Irman Gusman Center dan bagian dalam pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah (PWPM), (4) **politisi lokal**, beberapa politisi lokal, baik dari partai besar maupun partai independen, mendukung Irman Gusman karena pengaruh dan pengalamannya dalam politik nasional. Salah satu aktornya adalah Guspardi Gaus yang merupakan Anggota DPR RI 2019-2024 dan bagian dari kader Muhammadiyah yang sekarang berkontestasi dalam Pilkada Agam. (5) dukungan juga datang dari tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya seperti Fachri Ahmad, mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan mantan Rektor Universitas Andalas dan Shofwan Karim, mantan Ketua PWM Sumatera Barat 2015-2022.

Dari hasil temuan diatas, penelitian ini berfokus pada peran, dan proses dukungan Muhammadiyah sebagai jaringan politik Irman Gusman dalam memenangkannya di PSU DPD RI, dengan asumsi peneliti bahwa jaringan politik Irman Gusman di Muhammadiyah memainkan peran penting dalam kemenangan Irman Gusman dan tanpa jaringan tersebut belum tentu Irman Gusman akan memenangkan PSU DPD RI. Peneliti menambahkan bahwa mungkin jaringan ini beroperasi di tingkat akar rumput (*grassroots*) hingga nasional. Berdasarkan asumsi sementara tersebut, peneliti tertarik untuk menjadikan fenomena ini sebagai topik penelitian dengan rumusan masalah penelitian adalah bagaimana peran dan jaringan politik Irman Gusman di Muhammadiyah dalam kemenangan Irman Gusman di PSU DPD RI Dapil Sumatera Barat Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran dan proses jaringan politik Irman Gusman di Muhammadiyah Sumbar dalam kemenangan Irman Gusman pada PSU DPD RI tahun 2024 di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk penelitian sejenis yang juga meneliti tentang jaringan politik pada organisasi keagamaan dan sosial, yaitu Muhammadiyah ataupun yang lainnya. Menurut peneliti kasus ini unik karena baru pertama terjadi di Indonesia PSU di satu Dapil Provinsi Sumbar dan dimenangkan oleh Irman Gusman sebagai calon yang baru masuk tanpa melakukan kampanye terbuka selama kontestasi Pemilihan PSU DPD RI dan kemungkinan di masa yang akan datang bisa saja terjadi kembali.

2. Secara Praktis

Diharapkan memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa ilmu politik tentang jaringan politik di lembaga sosial dan keagamaan dalam tataran kehidupan demokrasi di arena Pileg khususnya Pileg DPD RI.

